

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang akan dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya. Berikut ini uraian beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan yang telah mendukung penelitian ini:

1. **Muh. Arief Ujiyantho dan Bambang Agus Pramuka 2007**

Muh. Arief Ujiyantho dan Bambang Agus Pramuka membahas tentang Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan(studi pada perusahaan *go public* sektor manufaktur). Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan corporate governance terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan. Berdasarkan hasil pengujian linear berganda ditemukan bahwa Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut: 1) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba;2) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba; 3) Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba; 4) Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba; 5) Pengaruh kepemilikan institusional,

kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris secara bersama-sama teruji dengan tingkat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba; dan 6) Manajemen laba (*discretionary accruals*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (*cash flow return on assets*).

Persamaan

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba, dan menggunakan *proxy corporate governance* yang sama yaitu: ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan kepemilikan manajerial. Uji yang digunakan sama-sama menggunakan regresi berganda.

Perbedaan

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba dan kinerja keuangan sedangkan peneliti saat ini hanya meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu seluruh perusahaan manufaktur pada tahun 2001-2004 sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel perusahaan *automotive and allied* pada tahun 2007-2009.

2. Marihot Nasution dan Doddy Setiawan 2007

Marihot Nasution dan Doddy Setiawan membahas tentang Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *corporate governance* terhadap tindakan manajemen laba yang terjadi di perusahaan perbankan. Dari hasil pengujian regresi linear berganda ditemukan bahwa secara individual, komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2000-2004

Persamaan

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba. Uji yang digunakan sama-sama menggunakan regresi berganda.

Perbedaan

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu perbedaan sampel yang diambil. Peneliti dahulu menggunakan sampel industri perbankan yang ada di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2000-2004 sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel perusahaan *automotive and*

allied product yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2009

3. **Gideon SB. Boediono 2005**

Gideon SB. Boediono sentosa membahas tentang Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris yaitu pengaruh mekanisme *corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komposisi dewan komisaris baik secara bersama-sama maupun individual terhadap manajemen laba. Selain itu juga pengaruh mekanisme *corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komposisi dewan komisaris serta manajemen laba baik secara bersama-sama maupun individual terhadap kualitas laba. *Good corporate governance* diprosikan dengan mekanisme kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang pertama pengaruh mekanisme *corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris secara bersama-sama terhadap manajemen laba, teruji dengan tingkat pengaruhnya lemah. Kedua pengaruh mekanisme *corporate governance* secara individual

terhadap manajemen laba adalah sebagai berikut: a) Mekanisme kepemilikan institusional memberikan tingkat pengaruh terhadap manajemen laba yang cukup kuat. Ini mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme kepemilikan institusional dapat memberikan kontribusi terhadap tindakan manajemen laba.

b) Mekanisme kepemilikan manajerial memberikan tingkat pengaruh terhadap manajemen laba yang lemah. Ini mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme kepemilikan manajerial kurang memberikan kontribusi dalam mengendalikan tindakan manajemen laba. c) Mekanisme komposisi dewan komisaris memberikan tingkat pengaruh terhadap manajemen laba yang sangat lemah. Ini mengindikasikan bahwa komposisi dewan komisaris menjadi mekanisme yang memberikan kontribusi yang kurang efektif.

Persamaan:

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu sama-sama menggunakan data sekunder perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu juga penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada pembahasan tentang manajemen laba dan ada beberapa proksi yang sama yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris.

Perbedaan:

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu objek penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris, manajemen laba dan kualitas laba. Sedangkan penelitian saat ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan publik manajemen laba.

Populasi penelitian terdahulu yaitu menggunakan emiten di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang memenuhi kelengkapan data berdasarkan kriteria: 1) Emiten kelompok industri manufaktur di BEJ yang tercatat dari tahun 1996 sampai dengan 2002. 2) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 1996 – 2002. 3) Perusahaan memiliki data kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris dan *return* saham. Populasi penelitian Saat ini yaitu menggunakan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memenuhi kelengkapan data berdasarkan kriteria: 1) Emiten kelompok perusahaan *automotive and allied products* di BEI yang tercatat dari tahun 2007 sampai dengan 2009. 2) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2007 – 2009. 3) Perusahaan memiliki data kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan

komisaris, Proposisi komisaris Independen, kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.

4. Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud Machfoedz 2003

Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud Machfoedz membahas tentang Analisis Hubungan mekanisme *Corporate Governance* dan indikasi Manajemen Laba. Penelitian ini mencoba menguji beberapa mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba dan kualitas laba. Mekanisme *corporate governance* yang diuji dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan karakteristik dewan komisari. Berdasarkan hasil empiris, mekanisme-mekanisme ini diyakini memiliki pengaruh terhadap manajemen laba yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas laba juga. Hasil penelitian ini berhasil mendukung bukti adanya pengaruh mekanisme *corporate governance*, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap penurunan manajemen laba yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan. Tetapi untuk mekanisme dewan direksi hasil yang diperoleh kontradiktif karena disatu sisi ukuran dewan direksi yang kecil mampu mengurangi manajemen laba, tetapi disisi lain ukuran direksi yang kecil tidak mampu meningkatkan kualitas laba. Hal ini mungkin disebabkan karena ukuran atau jumlah dewan direksi saja belum cukup untuk mengukur efektivitas pengawasan dewan direksi. Untuk penelitian yang akan

datang, perlu juga untuk mempertimbangkan atau menguji penggunaan model yang tepat untuk menghitung *discretionary accrual*.

Persamaan

Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama menggunakan data sekunder yang dimana perusahaannya yang terdaftar di bursa efek, selain itu juga penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini juga sama-sama ingin mengetahui apakah ada pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba. Ada beberapa *proxy corporate governance* yang sama antara peneliti sebelumnya dengan peneliti saat ini yaitu ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial.

Perbedaanya

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu peneliti terdahulu menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek Jakarta pada tahun 1995-2000, sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel perusahaan *automotive and allied products* yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2007-2009. Penelitian terdahulu selain menguji pengaruh antara *corporate governance* terhadap manajemen laba peneliti terdahulu juga meneliti pengaruh antara *corporate governance* terhadap kualitas laba sedangkan peneliti saat ini hanya meneliti

tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba.

2.2 Landasan Teori

Pada landasan teori ini akan dijelaskan beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan hipotesis serta analisisnya:

2.2.1 Good Corporate Governance

Good corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dana akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan nilai etika. Dengan melakukan penerapan *good corporate governance* diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaannya yang dapat menguntungkan semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan *Corporate Governace* dapat diibaratkan sebagai sekumpulan hukum, perturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi sebuah perusahaan untuk menarik modal, dan sumber daya manusia, suatu operasional entitas dapat beroperasi secara efisien, sehingga perusahaan dapat menjaga kelangsungan kegiatan operasional dengan menghasilkan nilai ekonomis jangka panjang untuk pemegang saham dan masyarakat keseluruhan (Muh. Arief Effendi, 2009: 1).

Governance structure adalah struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perusahaan yakni Pemilik/ Pemegang Saham, Pengawas/Komisaris, dan Pengelola/ Direksi/ Manajemen. *Corporate governance* merupakan cara atau mekanisme untuk memberikan keyakinan pada para pemasok dana perusahaan akan diperolehnya return atas investasi mereka (Shleifer dan Vishny, 1997) Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, 2006 prinsip-prinsip *good corporate governance* meliputi:

1. Prinsip Independensi

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

2. Prinsip Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Prinsip Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

4. Prinsip Pertanggungjawaban

Perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

5. Prinsip Kewajaran

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

Menurut Arief (2009: 4) prinsip-prinsip *good corporate governance*

meliputi:

1. Transparansi

Keterbukaan didalam melaksanakan proses pengambilan keputusan serta pengungkapan informasi secara materil yang relevan mengenai perusahaan.

2. Pengungkapan

Penyajian informasi kepada pihak pemangku kepentingan yang dimana berisikan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.

3. Kemandirian

Perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada konflik kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif.

5. Pertanggungjawaban

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip yang sehat.

6. Kewajaran

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul akibat dari perjanjian dan peraturan yang berlaku.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menjelaskan prinsip-prinsip corporate governance yang dinyatakan oleh FCGI diantaranya mencakup (1) hak-hak pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu mengenai perusahaan serta dapat ikut serta dalam pengambilan

keputusan mengenai perubahan-perubahan yang sifatnya mendasar, (2) perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham termasuk minoritas dan asing serta melarang perdagangan oleh pihak dalam, (3) peranan pemegang saham harus diakui sesuai ketentuan hukum dan perusahaan mendorong terciptanya kerjasama antar pihak berkepentingan untuk menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari sisi keuangan

2.2.2 Corporate Governance Framework

Menurut (Antonius Alijoyo, 2004: 16) Setiap negara memiliki *corporate governance code* masing-masing, pada prinsipnya ada beberapa aspek universal *corporate governance frame work* yang terdapat pada masing-masing kodetersebut, meliputi:

1. Tujuan Korporasi (*corporate objective*)

Korporasi sudah seharusnya berusaha menjamin kelangsungan hidupbisnisnya dalam jangka panjang dan mengelola hubungan dengan *Stakeholder* secara efektif. Korporasi seharusnya mengungkapkan informasi dengan akurat, memadai, dan tepat waktu juga bersikap transparan terhadap investor tentang akuisisi, hak dan kewajiban kepemilikan, serta penjualan saham.

2. Hak Suara (*Voting Right*)

Pemegangan saham biasa mengeluarkan satu suara untuk satu saham. Korporasi seharusnya menjamin hak pemilik untuk memberikan suara. Regulator seharusnya memfasilitasi hak memberikan suara dan

mewajibkan adanya *disclosure* yang terkait dengan proses pengambilan keputusan yang tepat waktu.

3. *Non-executive Corporate Board*

Terdapat desakan yang kuat agar *board* melibatkan anggota *non-executive* yang independen dalam jumlah dan kompetensi yang memadai. *Non-executive* yang independen sebaiknya tidak kurang dari dua anggota (tergantung besaran *board*) dan sama banyaknya dengan substantial majority. Komite Audit, Komite Remunerasi, dan Komite Nominasi sebaiknya mayoritas beranggotakan *non-executives* yang independen.

4. Kebijakan Remunerasi Korporasi (*Corporate Remuneration Policies*)

Dalam setiap laporan tahunan korporasi seharusnya mengungkapkan (*disclose*) kebijakan board tentang remunerasi sehingga investor dapat memutuskan apakah praktik dan kebijakan remunerasi tersebut telah sesuai dengan standar, kepatuhan, dan kepatantasan.

5. Fokus Strategik (*Strategic Focus*)

Modifikasi strategik yang penting bagi bisnis utama (*core business*) seharusnya tidak dibuat bila modifikasi yang diusulkan tidak disetujui *shareholders*. Demikian juga bila terjadi perubahan penting korporasi yang mendasar dan secara material berpengaruh melemahkan ekuitas atau mengikis *economic interest* atau hak kepemilikan saham dari *shareholders* yang ada.

6. Kinerja Operasional (*Operating Performance*)

Corporate governance framework seharusnya memfokuskan perhatian *board* pada hal-hal yang berkaitan dengan mengoptimalkan kinerja perusahaan.

7. *Shareholders Returns*

Corporate governance framework seharusnya memfokuskan perhatian *board* pada pengoptimalan *return* kepada *shareholders*.

8. *Corporate Citizenship*

Korporasi harus taat kepada berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku pada wilayah hukum di mana korporasi tersebut beroperasi.

9. Implementasi *Corporate Governance*

Apabila di suatu negara telah ada *code* yang menjadi rujukan atau pedoman praktik *good corporate governance* (GCG), maka *code* tersebut harus diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di negara tersebut

2.2.3 Agency Problem

Asumsi dasar lainnya yang membangun *agency theory* adalah *agency problem* yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikannya mendapatkan *return* yang maksimal, sedangkan manajer berkepentingan terhadap perolehan *incentive* atas pengelolaan dana pemilik (Antonius Alijoyo, 2004: 16).

2.2.4 Earning Management

Para manajemen memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa alternative dalam mencatat transaksi sekaligus memilih pilihan-pilihan yang ada pada perilaku akuntansi. Fleksibilitas ini digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelolah laba. Perilaku manajemen yang diladaskan pada manajemen laba yaitu perilaku *opportunistic* manajer dan *efficient contracting*. Sebagai perilaku *opportunistic*, manajer memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, hutang dan *political cost* (Scott, 2000)

2.2.5 Deteksi Manajemen Laba secara Kuantitatif

Manajemen laba secara umum dibagi menjadi dua kategori yaitu: manajemen laba melalui kebijakan akuntansi dan manajemen laba melalui aktivitas riil. Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan menggunakan teknik dan kebijakan akuntansi. Sementara manajemen laba melalui aktivitas riil merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan melalui aktivitas-aktivitas yang berasal dari kegiatan bisnis normal atau yang berhubungan dengan kegiatan operasional misalnya menunda kegiatan promosi produk atau mempercepat penjualan dengan pemberian diskon besar-besaran.

Pada deteksi ini, fokus pembahasan terletak pada penjelasan model-model deteksi manajemen laba yang banyak digunakan dalam riset empiris. Model-model tersebut diantaranya adalah *Jones Model* (1991), *Modified Jones Model* (1995), *Kaszinik Model* (1999), dan *performance-Matched Discretionary*

Accruals Model yang ditentukan oleh Kothari dan kawan-kawan (2005) (Dedhy, 2011: 70).

Secara detail, dengan JM, penentuan akrual diskresioner sebagai indikator manajemen laba dijabarkan dalam tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menentukan nilai total akrual (TA) dengan formulasi:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

2. Menentukan nilai parameter α_1 , α_2 dan α_3 dengan formulasi:

$$TA_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 \Delta R_{evit} + \alpha_3 PPE_{it} + \varepsilon_{it}$$

Lalu, untuk mensakala data, semua variable tersebut dibagi dengan asset tahun sebelumnya (A_{it}) sehingga formulasinya berubah menjadi:

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1 / A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta R_{evit} / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

3. Menghitung nilai akrual nondiskresioner (NDA) dengan formulasi:

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1 / A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta R_{evit} / A_{it-1} - \Delta R_{ecit} / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / A_{it-1})$$

4. Menentukan nilai akrual diskresioner yang merupakan indikator manajemen laba akrual dengan cara mengurangi total akrual dengan nondiskresioner, dengan formulasi:

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$$

2.2.6 Konsep Indikator *Mekanisme Corporate Governance*

Pengukuran kualitas *good corporate governance* oleh perusahaan dapat diproksikan dengan beberapa indikator yang diperoleh dari unsur-unsur mekanisme *corporate governance*, unsur tersebut meliputi :

1. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan (Beiner *et al*, 2003). Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasehat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris (KNKG, 2004). Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan.

Dewan komisaris sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan, hilangnya independensi komisaris dalam pengambilan keputusan akan mengurangi objektivitas dalam pengambilan keputusan perusahaan (Alijoyo dan Subarto Zaini, 2004:33).

Ukuran dewan komisaris akan mempengaruhi mekanisme pengawasan terhadap perusahaan, dengan adanya dewan komisaris maka pengelolaan dan pengawasan seluruh pihak perusahaan akan semakin baik. Oleh karena itu, kredibilitas seorang dewan komisaris dipertaruhkan dalam mengendalikan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya. Penelitian yang dilakukan Jensen (1976) menyimpulkan bahwa dewan komisaris berukuran kecil akan lebih mudah melakukan tindakan pengawasan dibandingkan berukuran besar, semakin banyak personil dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka dapat berakibat buruk pada kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris yang berukuran besar dianggap kurang efektif menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi kerja dan pembuatan keputusan bagi perusahaan.

Tiap perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris berbeda-beda, hal tersebut tergantung oleh jenis keahlian yang dimiliki dari suatu industri perusahaan tersebut. Selain hal tersebut, resiko menyeluruh suatu perusahaan pun menentukan jumlah dewan komisaris, semakin banyak yang memantau resiko yang dihadapi perusahaan maka akan semakin besar pula perusahaan dapat mengatasi ancaman oleh resiko tersebut.

UDK=JUMLAH DEWAN KOMISARIS

Keterangan :

jumlah dewan komisaris = dewan komisaris tahun

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan disini berarti bahwa, sebuah institusi atau perusahaan yang mempunyai kepemilikan saham terbesar dalam suatu perusahaan. Institusi disini berarti bahwa sebuah lembaga yang memiliki kepentingan yang cukup besar terhadap investasi termasuk berinvestasi dengan saham. Struktur kepemilikan institusional diyakini mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional merupakan dua mekanisme *corporate governance* yang mampu mengatasi masalah keagenan. Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak

manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi kepentingan pihak manajemen.

$$KI = \left(\frac{\text{Saham Institusi}}{\sum \text{Lembar Saham Beredar}} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

saham institusi = jumlah saham yang dikeluarkan oleh investee dan dimiliki oleh investor.

\sum saham yang beredar = jumlah saham yang dikeluarkan oleh investee

3. Proporsi Komisaris Independen

Pada dasarnya dewan komisaris terdiri dari pihak yang berasal dari luar perusahaan yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi, dalam pengertian independen disini adalah mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan (Antonius.dkk, 2004: 49). Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

$$PKI = \left(\frac{\text{Komisaris Independen}}{\Sigma \text{Komisaris}} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

Σ komisaris = jumlah antara komisaris dependen dengan komisaris independen.

4. Kepemilikan Manajerial

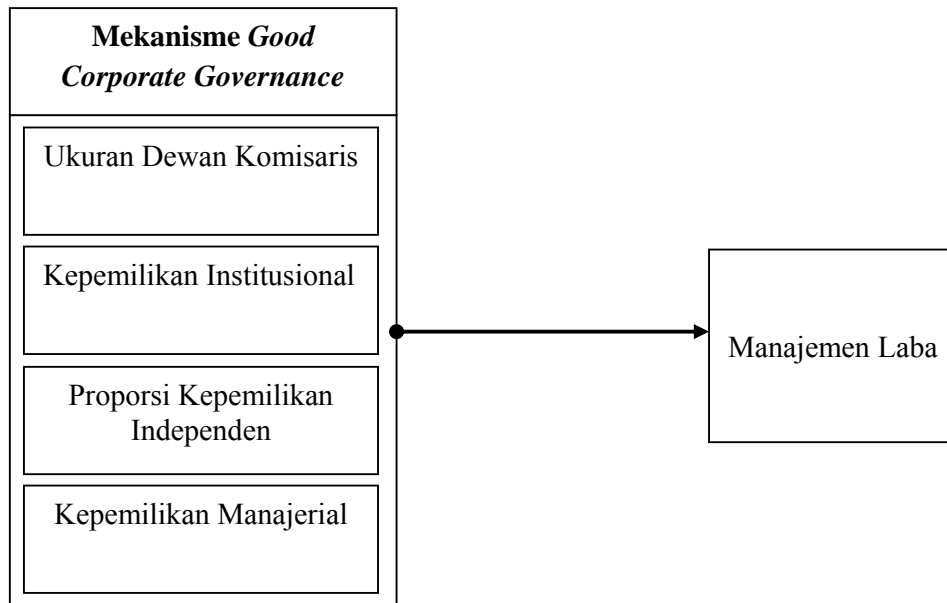
Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

$$KM = \left(\frac{\Sigma \text{ Saham Direksi \& Komisaris}}{\Sigma \text{ Lembar Saham Beredar}} \right) \times 100\%$$

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah alur pemikiran sebuah penelitian dalam menjawab masalah penelitian dan dinyatakan dalam sebuah skema yang menjelaskan pokok-pokok unsur penelitian. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menggunakan pengukuran kualitas *corporate governance* yang diukur oleh beberapa konsep indikator mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari: ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional proporsi, komisaris independen dan kepemilikan manajerial. Keempat indikator tersebut menjadi variabel independen dalam penelitian ini, hal tersebut termotivasi oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Muh. Arif Ujiantho (2007).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen laba. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan skema kerangka pemikiran tersebut diatas, didapatkan hipotesis atas penelitian sebagai berikut:

1. **Ukuran Dewan Komisaris dan Manajemen Laba**

Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner, Drobetz, Schmid dan Zimmermann (2003) dalam M. Arief Ujiantho (2007) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) dalam Beiner *et al.* (2003) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme *governance* yang penting. Mereka juga menyarankan bahwa dewan komisaris yang ukurannya besar kurang efektif daripada dewan yang ukurannya kecil.

Penelitian yang dilakukan Yermack (1996), Beasley (1996) dan Jensen (1993) dalam M. Arief Ujiantho (2007) juga menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.

Oleh karena itu hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H₁ :Terdapat pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba

2. Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Gideon, 2005).

Cornet *et al.*, (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri dengan demikian akan mengurangi tingkat risiko terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen.

H₂ :Terdapat pengaruh antara struktur kepemilikan institusional terhadap manajemen laba

3. Proporsi Komisaris Independen dan Manajemen Laba

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Pratana dan Mas'ud (2003) memberikan simpulan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Sehingga, jika anggota dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya penggunaan *discretionary accruals* (Cornett *et al.*, 2006).

Perusahaan yang menyelenggarakan sistem *corporate governance* diyakini akan membatasi pengelolaan laba yang oportunistik. Oleh sebab itu semakin tinggi kualitas audit, maka semakin tinggi proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, semakin kecil *earnings management* dilakukan. Hubungan negatif antara *corporate governance* dan *earnings management* ini dapat memperlemah pengaruh antara *earnings management* (Vinola Herawaty, 2008).

Proporsi Komisaris Independen diukur berdasarkan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan

sampel. Skala data adalah skala rasio menurut (Agnes Andriyani Santosa, 2009).

H₃ : Terdapat pengaruh antara proposisi komisaris independen terhadap manajemen laba

4. **Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba**

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Gideon, 2005).

Hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan *discretionary accruals* sebagai ukuran dari manajemen laba dan berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan kandungan informasi dalam laba. Pemikiran ini didukung hasil penelitian Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud Mahfoedz (2003). Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa perusahaan yang dikelola oleh

manajer dan memiliki persentase tertentu saham perusahaan dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Indikator atau proksi yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manjerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dari seluruh jumlah saham perusahaan yang dikelola.

Kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Mork et al (1989) dalam Gideon SB.Boediono (2005)

H₄ :Terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba